

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan setelah diolah kembali, maka hasil penelitian tentang “Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Kota Pangkalpinang”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diterapkan pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang, maka peneliti menyimpulkan bahwa RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya menerapkan SPM sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti, RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan baik. Semua data yang harus dilaporkan dalam LAKIP telah dilaksanakan oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang. LAKIP yang disusun oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang telah berisi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban periodik, memuat tentang pencapaian indikator yang ada pada Standar Pelayanan Minimal, rencana strategik bisnis rumah sakit dan tiap tahun sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut telah sesuai dengan indikator SPM, sehingga kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja pada RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat dikatakan baik.

3. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti, RSUD Depati Hamzah telah memberikan informasi tentang pembayaran pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu ketika pasien telah ditangani dan dinyatakan sembuh, maka pembayarannya menunggu rincian biaya dan langsung disetor pada bendahara penerimaan melalui loket.
4. Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data oleh peneliti, terkait akuntabilitas kinerja, dari 8 sasaran strategis yang diuraikan dalam 20 indikator kinerja, terdapat 12 indikator yang tidak tercapai, 3 indikator sudah sesuai target dan 5 indikator dapat melampaui target yang ditetapkan. Secara umum hal ini menggambarkan pelaksanaan kinerja tahun 2016 belum memadai.
5. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang saat ini adalah belum optimalnya serapan anggaran. Bahwa di tahun 2016, dari total anggaran Rp 53.828.236.587,50,- yang terealisasi hanya Rp 39.080.512.607,80,- atau sekitar 72,60%. Jika dibandingkan pada tahun 2015, serapan anggaran ditahun 2016 belum maksimal. Bahwa ditahun 2015 lalu dari total anggaran belanja Rp 49.045.729.206,55 yang terealisasi hanya Rp 41.177.119.425,05,- atau sekitar 83,96%. Berdasarkan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008, RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang telah memenuhi standar yang ditetapkan, hal ini karena *cost recovery* yang dicapai pada tahun 2015 sebesar 102% dan pada tahun 2016 *cost recovery* yang dicapai sebesar 106% yang dimana ditetapkan yaitu $\geq 40\%$.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka ada beberapa saran maupun rekomendasi yang penulis berikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh pihak yang bersangkutan.

1. Bagi RSUD Depati Hamzah diharapkan dapat mengimplementasikan SPM dengan maksimal. SPM terbaru adalah Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Agar rumah sakit dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan, maka dapat meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit.
2. RSUD Depati Hamzah harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan rencana kegiatan dan pada pelaksanaan kegiatan.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hendaknya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi agar upaya

pencapaian visi dan misi RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang dapat terwujud.

4. Bagi pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memperhatikan sarana, prasarana, dan keadaan rumah sakit untuk dapat menunjang peningkatan kinerja RSUD.
5. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi, khususnya terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

